

Kesadaran Berpolitik Di Indonesia

Sakinatuz Zahro

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
sakinatuzahro@mhs.uingusdur.ac.id

Miladina Nur Kamila

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
miladianurkamila@mhs.uingusdur.ac.id

Muhammad Ardiansyah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
muhammadardiansyah@mhs.uingusdur.ac.id

Isabna Maghfirotus Safitri

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
isabnamaghfirotussafitri@mhs.uingusdur.ac.id

Putri Sofina Naharina

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
putrisofinanaharina@mhs.uingusdur.ac.id

Alfiana Nanda Waraswati

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
alfiananandawaraswati@mhs.uingusdur.ac.id

Abstrak

Permasalahan politik di Indonesia saat ini adalah kurangnya kesadaran politik dalam diri masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Kesadaran politik di Indonesia menjadi fokus utama penelitian ini. Melalui pendekatan multidimensi, penelitian ini mengkaji peran teknologi dalam meningkatkan kesadaran politik dalam masyarakat Indonesia yang semakin terhubung. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran politik, seperti pendidikan politik, akses terhadap informasi, dan partisipasi masyarakat, menjadi dasar utama dalam eksplorasi ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka ruang baru bagi partisipasi politik, di mana masyarakat memiliki akses yang lebih cepat dan lebih luas terhadap informasi politik. Namun, tantangan yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi juga perlu diperhatikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada penelitian ini informasi yang diperoleh berasal dari kepublikan. Penelitian ini menggunakan proses pengolahan dan analisis data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis data sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti disinformasi dan polarisasi, yang dapat menghambat kesadaran politik yang sehat. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran politik juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan ini. Dalam konteks ini, penelitian ini mengulaskan inisiatif dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik di tingkat lokal dan nasional. Implikasi dari temuan-temuan penelitian ini dapat menjadi landasan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat kesadaran politik di Indonesia.

Kata kunci: Kesadaran Berpolitik; Pendidikan Politik; Tantangan; Upaya Peningkatan; Masyarakat Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Di negara demokrasi partisipasi politik warga negara berangkat dari pemahaman, bahwa kedaulatan negara berasal dari rakyat. Karena itu dalam implementasinya segala pengambilan keputusan politik harus melibatkan peran serta rakyat di dalamnya. Hal tersebut bertujuan agar setiap kebijakan politik yang nanti dihasilkan benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat (Santika et al., 2019).

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokrasi. Karena itu segala praktik penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah berdasarkan pada kehendak rakyat. Secara eksplisit landasan konstitusional penyelenggaraan kekuasaan negara secara demokratis tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang telah diamandemen. Dalam Pasal tersebut secara jelas dinyatakan, bahwa “Kedaulatan Negara berada Ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, segala pengambilan keputusan politik haruslah bersumber pada kehendak rakyat.

Sebagai wujud nyata pengakuan negara terhadap kedaulatan rakyat ialah dengan melibatkan atau mengikutsertakan warga negara Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan politik (Wiratraman, 2019).

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk aktualisasi dari demokrasi dalam bentuk politik dan yang akan

mendorong demokrasi berdasarkan nilai-nilai demokrasi tersebut, antara lain nilai-nilai demokrasi adalah sebagai berikut: Keterbukaan, kebebasan, dan aturan yang berlaku. Konsep politik ini sudah ada sejak dahulu pada pemikiran manusia dan bersifat belum terlalu jelas. Konsep ini berfungsi untuk menyusun generasi tentang fenomena-fenomena yang diartikan teori (Anisah Nasih Zulfa et al., 2019).

Sebagian masyarakat enggan terlibat dalam politik, sebab politik itu buruk menurut masyarakat (Syuhada, 2023). Namun, berbicara mengenai politik berarti sedang membicarakan perilaku setiap individu di dalam masyarakat secara keseluruhan. Partisipasi politik mendorong setiap individu untuk bertindak menegosiasikan kepentingan masing-masing agar kemudian melahirkan kesepakatan bersama tanpa merugikan pihak manapun (Anisah Nasih Zulfa et al., 2019).

Kesadaran berpolitik merupakan salah satu dari pilar utama yang menjadi dasar dari sistem sosial dan juga politik. Nilai tersebut tidak dapat diabaikan, karena berpengaruh terhadap proses pembangunan negara. Jika nilai tersebut diabaikan, maka negara akan terkonstruksi tanpa dasar dan secara perlahan runtuh ketika menghadapi krisis besar yang melibatkan negara serta masyarakat. Kesadaran sendiri mempunyai makna, yaitu pandangan seseorang mengenai dirinya sendiri dan lingkungan tempat dirinya berada. Sedangkan kesadaran berpolitik memiliki arti

yaitu pandangan seseorang mengenai hak serta kewajiban politik dan peristiwa yang terjadi dalam lingkungan sekitar (Sutjipto et al., 2023).

Kesadaran berpolitik mempunyai peran penting sebagai salah satu dari kebutuhan pokok dalam pembentukan pandangan politik seseorang. Dalam meningkatkan kesadaran berpolitik seseorang, bukan hanya didapat dengan membaca melalui tulisan saja, melainkan juga memerlukan program khusus secara ilmiah dan logis yang mempelajari hal terkait agar dapat meningkatkan kesadaran berpolitik seseorang secara maksimal (Sutjipto et al., 2023).

Menurut buku "*Political Culture and Democracy in Indonesia: A Survey of Indonesian Students at Home and Abroad*" oleh Dewi Fortuna Anwar, kesadaran berpolitik di Indonesia masih terkait erat dengan identitas etnis, agama, dan golongan sosial. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung memilih calon pemimpin berdasarkan faktor-faktor tersebut, bukan berdasarkan kualitas dan kapasitas calon pemimpin itu sendiri. Selain itu, kurangnya akses informasi dan pendidikan politik juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran berpolitik di Indonesia.

Permasalahan politik di Indonesia saat ini adalah kurangnya kesadaran politik dalam diri masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Hal ini dapat dilihat dari

penyelenggaraan pemilu di Indonesia, pada beberapa daerah di Indonesia masih banyak masyarakat yang golput (golongan putih) yang disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik ataupun tokoh yang dicalonkan oleh partai politik di pemilu. Secara umum, pandangan generasi muda terhadap politik menggambarkan suatu hal yang negatif, yaitu menganggap politik hanya tentang memperebutkan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan untuk masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan generasi milenial cenderung tidak ingin tahu terhadap kondisi politik di Indonesia karena *image* politik yang ditampilkan kepada mereka tidak baik (Irwan et al., 2021).

Penyelewengan kekuasaan, kasus-kasus korupsi perilaku tak etis politisi yang ada, dan hal-hal negatif lainnya dari dunia politik bisa dilihat secara terang-terangan di segala media, termasuk media sosial yang menjadi bagian dari kehidupan generasi muda masa kini. Belum reda kekagetan kita mendengar satu kasus korupsi, kasus korupsi lainnya terkuak. Dan sebagian besar kebanyakan pelaku korupsi tersebut punya latar belakang partai politik. Begitu seterunya. Itulah realita politik yang ditangkap oleh generasi muda. Wajar jika generasi muda geram terhadap perilaku sebagian pelaku politik yang tidak etis dan korup. Terlalu banyak drama dari para pelaku politik yang ditunjukkan dipublik yang banyak membuat

anak muda menjadi enggan berpolitik (Anisah Nasih Zulfa et al., 2019).

Persoalan-persoalan lain yang menyangkut politik yang membuat generasi muda khawatir adalah maraknya tulisan yang bersifat provokatif dan kampanye hitam dimedia sosial. Tentunya mereka merasa marah sekaligus takut dengan informasi hoax. Menurut mereka, jika tulisan provokatif atau hoax tentang politik kian menyebar, semakin banyak pula orang yang akan merasa curiga atau saling membenci (Anisah Nasih Zulfa et al., 2019).

II. METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian di dalamnya nanti memberikan hasil berupa penemuan-penemuan yang diperoleh tidak bisa dengan menerapkan langkah-langkah dari statistik ataupun dengan cara lainnya yang berhubungan dengan kuantifikasi (Murdiyanto, 2020). Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif dimana penulis harus memberikan kalimat-kalimat yang menceritakan permasalahan tersebut atau dalam bentuk naratif, didalamnya berisikan mengenai penjelasan suatu objek dalam penelitian tersebut, fenomena ataupun yang berkaitan dengan setting sosial. Jadi ketika menggunakan penelitian kualitatif dalam penulisannya baik dari bentuk data dan fakta

nantinya digabung menjadi bentuk kata (Anggito & Setiawan, 2018).

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data dari permasalahan tersebut berasal dari kepustakaan (*library research*). Kepustakaan bisa diartikan yaitu sebagai serangkaian himpunan kegiatan yang memiliki hubungan dengan metode untuk pengumpulan data pustaka, membaca kemudian mencatat dan mengolah menjadi bahan penelitian. Penelitian ini dalam hal pengumpulan data atau innformasinya dilakukan dengan mengkaji dan mengeksplorasi melalui dari beberapa sumber baik yang berupa cetak ataupun berupa elektronik yaitu dari buku, jurnal, serta dokumen-dokumen yang relevan sesuai dengan penelitian atau kajian yang dibahas dalam penelitian ini (Supriyadi, 2017).

Pembahasan dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana kesadaran berpolitik di Indonesia mengingat kesadaran berpolitik di Indonesia masih tergolong rendah, terutama di kalangan masyarakat awam. Selain itu bagaimana peranan teknologi dalam meningkatkan kesadaran politik dimana zaman sekarang merupakan Generasi Z yang melek akan teknologi. Disamping itu pastinya ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran berpolitik serta bagaimana upaya untuk meningkatkan kesadaran berpolitik.

Penelitian ini menggunakan proses pengolahan dan analisis data sekunder yang

dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis data sekunder. Kemudian mengembangkan teori yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan penyempurnaan pertanyaan untuk penelitian setelah memperoleh data atau informasi-informasi tersebut. Selanjutnya proses sampai pada bukti yang relevan dan dijadikan satu yang nantinya dikembangkan dalam mendukung teori dengan kata-kata yang disusun kedalam bentuk teks menjadi lebih luas lagi, yang kemudian bisa mengarah dalam hal penarikan kesimpulan dari permasalahan tersebut (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Berpolitik di Indonesia

Kesadaran berpolitik merupakan salah satu dari pilar utama yang menjadi dasar dari sistem sosial dan juga politik. Nilai tersebut tidak dapat diabaikan, karena berpengaruh terhadap proses pembangunan negara. Jika nilai tersebut diabaikan maka negara akan terkonstruksi tanpa dasar dan secara perlahan runtuh ketika menghadapi krisis besar yang melibatkan negara serta masyarakat. Kesadaran sendiri mempunyai makna yaitu pandangan seseorang mengenai dirinya sendiri dan lingkungan tempat dirinya berada. Sedangkan kesadaran berpolitik memiliki arti, yaitu pandangan seseorang mengenai hak serta kewajiban politik dan peristiwa yang terjadi dalam lingkungan sekitar (Nurbaiti, 2019).

Kesadaran politik adalah keadaan kesadaran seseorang secara penuh akan pengetahuan berbagai hal terkait proses politik dalam masyarakat. Menurut Almond dan Verba, seseorang dianggap memiliki kesadaran politik apabila ia telah menyadari dan mengetahui hal-hal yang terkait dengan sistem politik baik dari segi *output* maupun *input*. *Input* dalam hal ini meliputi tuntutan ataupun dukungan dari masyarakat kepada pemerintah. *Output* berupa keputusan, tindakan atau hasil kebijakan pemerintah yang diterapkan (Nurbaiti, 2019).

Secara umum kesadaran berpolitik ialah bentuk sikap dan kesadaran yang dirasakan setiap individu dalam politik bernegara. Bentuk kesadaran politik paling dasar ialah tentang bagaimana seseorang mengetahui sampai mana kegiatan politik yang terjadi di wilayahnya. Pengetahuan sosial politik dan perhatian akan kebijakan politik yang diambil pemerintah juga termasuk kedalam kesadaran berpolitik. Dalam negara demokrasi setiap individu memiliki hak dan kewajiban tersendiri, berkaitan dengan itu politik menjadi alat untuk merealisasikan hak dan kewajiban warga negara (Sutjipto et al., 2023).

Kesadaran politik pada tahap selanjutnya dilihat dari sikap atau perasaan suka atau tidak suka pemilih pemula pada kebijakan yang dibuat pemerintah. Sikap tersebut dapat dilihat dari bagaimana pemilih pemula merasa diperhatikan, diuntungkan,

merasakan dampak dari kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Pada tahap tindakan atau perilaku individu dapat melihat dan menilai bagaimana kinerja pemerintah atau partai politik. Perilaku tersebut ada akibat hasil akhir dari pengetahuan dan pemahaman serta sikap terhadap kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Akan menjadi aneh apabila seseorang bersikap acuh tak acuh terhadap hak dirinya sendiri, disisi itulah kesadaran berpolitik menjadi hal yang komprehensif.

Kesadaran berpolitik di Indonesia bisa dikatakan belum sepenuhnya diterapkan, golongan masyarakat tertentu masih banyak yang acuh mengenai dunia perpolitikan di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari angka pertisipasi pemilu belakangan ini, melansir data dari kpu.go.id dalam laman setkab.go.id, semenjak Pilpress tahun 2014 hingga pilkada 2017 memang angka partisipasinya meningkat (69,6% - 74%), akan tetapi kembali menurun di pilkada tahun selanjutnya 2018, angka partisipasinya melonjak tinggi di Pilpres 2019 dengan persentase 81,9% yang menjadikanya angka tertinggi, namun kembali menurun di tahun setelahnya yaitu pilkada 2020 diangka 76,9% (Hamongan, Alfin J, 2022). Berdasarkan data tersebut bisa dikatakan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat Indonesia dalam berpolitik masih relatif belum stabil. Hasil tersebut tentunya dipengaruhi banyak faktor, yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kesadaran berpolitik terutama pada generasi muda.

Di era kemajuan zaman yang semakin cepat ini, sudah semestinya pengetahuan dan informasi mengenai dunia politik bisa disampaikan dengan cepat dan akurat. Walaupun demikian, pada kenyataannya media internet juga menjadi salah satu penyumbang berita bohong atau hoax tertinggi dalam politik, sangat disayangkan karena kurangnya edukasi dari pihak terkait dalam hal ini partai politik dan pemerintah. Menjadi menarik lagi apabila yang menjadi fokus peningkatan kesadaran ini ialah generasi muda. Akan sangat sesuai dengan strategi peningkatan kesadaran melalui media internet terutama media sosial. Sebenarnya media sosial dapat dimanfaatkan untuk berpartisipasi bagi kaum muda, namun sampai saat ini untuk partai politik itu sendiri, sosial media hanya digunakan sebagai tempat berpartisipasi, dan belum terlalu berdampak dengan kesadaran dan partisipasi generasi muda di dunia maya.

Tidak sedikit dari anak muda yang memandang dunia politik dari segi negatifnya saja, tentang perebutan kekuasaan, ajang korupsi dan menjadi alat penunjang identitas suatu kelompok saja. Jauh dari hal tersebut, hakikat sebenarnya politik ialah kegiatan dalam suatu sistem atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan (A. N. Zulfa et al., 2019). Berdasarkan hakikatnya politik di Indonesia seharusnya sejalan dengan tujuan bangsa, yaitu melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah seharusnya

pemerintah mendukung penuh kegiatan yang bertujuan meningkatkan partisipasi dan kesadaran berpolitik bagi masyarakatnya, karena pada dasarnya hal tersebut juga untuk mencapai tujuan bangsa.

Peran Teknologi dalam Meningkatkan Kesadaran Berpolitik

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai semua perangkat yang memiliki kapasitas untuk memproses data dan atau informasi, baik secara sistemik maupun sporadis, baik diaplikasikan pada produk maupun diaplikasikan pada proses. Dalam kamus yourdictionary.com dijelaskan bahwa teknologi informasi adalah 1) cabang teknologi yang berhubungan dengan praktis, misalnya bisnis dan industri, penggunaan komputer dan sistem telekomunikasi. 2) Teknologi yang terlibat dengan transmisi dan penyimpanan informasi, terutama pengembangan, instalasi, implementasi, dan manajemen sistem komputer dalam perusahaan, universitas, dan organisasi lainnya. 3) Teknologi informasi didefinisikan sebagai istilah luas yang mencakup pengembangan, pemasangan, dan penggunaan segala sesuatu yang berhubungan dengan komputasi dan telekomunikasi.

Secara faktual teknologi informasi berperan penting dalam proses perubahan politik. Terdapat keyakinan bahwa teknologi informasi dapat membuka jalan bagi demokrasi langsung sementara itu serta menghilangkan hambatan komunikasi dalam

proses demokratisasi. Demokrasi dan proses politik formal pada dasarnya bergantung pada komunikasi yang efektif dan pengambilan keputusan yang terinformasi tentang isu-isu publik di antara warga negara, politisi, pejabat, dan pemangku kepentingan lainnya yang mungkin terpengaruh oleh keputusan kolektifnya (Rahman et al., 2022).

Adapun pengaruh positif kemajuan teknologi di bidang politik: 1. Sumber Informasi, dampak positif paling besar dari teknologi terhadap politik adalah melimpahnya sumber informasi yang tersedia. Informasi memainkan peran penting dalam menjalankan kampanye politik. Menjelang pemilu, pemilih bisa mendapatkan informasi instan tentang kandidat, rekam jejaknya, mengecek profilnya, perkembangannya, dan informasi lain yang dibutuhkan sebelum memilihnya. 2. Mencari tahu calon pemilih, selain bagi masyarakat, kemajuan teknologi di bidang politik juga bermanfaat bagi kandidat politik. Kandidat yang berkompetisi bisa mencari tahu siapa yang berpotensi dan akan memilihnya kelak. Kandidat bisa mengetahui profil pemilih, informasi singkat tentang mereka, kelompok usia, dan minat politiknya. Kandidat selanjutnya bisa menentukan strategi kampanye, visi misi, dan program kerjanya. 3. Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Politik, politik cenderung dipandang apatis dan hanya buang waktu, terutama para generasi mudah. Pandangan ini berkebalikan dengan fakta, karena politik yang sesungguhnya menggerakkan negara.

Semua informasi hasil dari kemajuan teknologi dapat mengubah pandangan generasi muda. Selanjutnya mereka tak enggan lagi memberikan suara, atau melakukan politik praktis dengan dewasa dan bertanggung jawab (Hanandita, 2023).

Setiap manusia, pasti memiliki akal pikiran dan perasaan. Sadar akan hal yang dialami dan dikerjakan, memiliki keinginan yang kuat dalam setiap bidang kehidupan, tidak terkecuali tentang politik. Dalam sejarahnya politik berkembang pada zaman Yunani Kuno, bahkan sebelum manusia lahir sudah berpolitik. Namun, sikap akan kesadaran politik manusia masih sukar untuk mengakui dan melaksanakannya dalam aktifitas politik. Surbakti (2013:182) mengemukakan, bahwa kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.

Kesadaran politik merupakan suatu keinginan baik perorangan maupun kelompok untuk berkegiatan di lingkup kebijakan negara dan pemerintah. Kesadaran politik tidak hanya diterapkan di masyarakat secara umum tetapi harus diterapkan dalam diri setiap siswa. Karenanya, setiap siswa harus memiliki pengetahuan politik, perilaku politik, dan partisipasi politik, sehingga mampu menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Menurut Nasiwan (2012) pengetahuan politik merupakan konsep sentral dalam studi opini publik dan perilaku politik. Pengetahuan politik adalah dasar dari perilaku politik seseorang, yang dijelaskan dalam prespektif behavior dan prespektif psikologis. Jadi, pengetahuan politik terjadi karena dasar dari perilaku politik seseorang. Pengetahuan politik seseorang bisa dilihat dari perlakunya terhadap politik dijelaskan dalam pemikiran psikologis dan pemikiran behavior. Istilah perilaku sendiri Surbakti (2013) mengungkapkan bahwa sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat.

Sedangkan partisipasi politik menjadi hal sangat penting dan utama dalam kegiatan kegiatan politik, suatu pemilihan bisa sukses dilihat dari tingkat partisipasinya yang tinggi, menurut Surbakti (2013) partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menetukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Maka kepedulian utama dari partisipasi politik adalah tindakan yang dilakukan oleh warga yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil hanya oleh para wakil rakyat dan para pejabat pemerintah. Karenanya tidak dapat disangskakan lagi, bahwa partisipasi politik lebih dihubungkan dengan kegiatan demokrasi politik yang membuka ruang bagi aspirasi masyarakat dalam arti sesungguhnya yaitu dalam memilih

para elite politik dan untuk keberlangsungan suatu negara. Para elite politik tak luput menjadikan media sosial sebagai tempat untuk memperkenalkan dan mempromosikan diri. Hal ini dipengaruhi juga oleh teknologi yang terus berkembang, melalui media sosial *public figure* saling mengajak para pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan politik (Rahmawati & Candra H, 2019).

Keterbukaan informasi menjadi indikator penting dalam upaya meningkatkan partisipasi publik, menjadi hal mutlak bahwa dengan terpublikasinya kondisi terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk informasi-informasi yang dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat, maka akan mendorong inisiatif masyarakat untuk terlibat baik itu kontribusi secara ide dan gagasan maupun kontribusi dalam bentuk peran aktif secara langsung. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan semua orang di dunia dapat terhubung tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Keadaan ini kemudian mengubah cara masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Perkembangan teknologi juga telah diimplementasikan pada manusia yang pada hakikatnya merupakan makhluk sosial, sehingga teknologi dapat dikatakan telah ikut serta dalam rangka advokasi hak-hak manusia sebagai warga negara di bawah suatu hukum yang berlandaskan ideologi dan Undang-Undang Dasar yang telah disusun dan telah disepakati bersama (Faris et al., 2023).

Tantangan dalam Meningkatkan Kesadaran Berpolitik

Tantangan dalam meningkatkan kesadaran berpolitik di antara anak muda dan masyarakat umum biasanya meliputi persepsi negatif terhadap politik, kurangnya partisipasi politik, serta pengaruh media sosial. Anak muda seringkali memiliki pandangan negatif terhadap politik, menganggapnya sebagai urusan orang tua, korupsi, dan kebohongan publik (Santika, 2022). Banyak anak muda di negeri ini memiliki persepsi negatif begitu mendengar kata politik. Dunia politik menurut pandangannya adalah dunia yang kelam, tempat para monster politik saling memangsa satu sama lain, termasuk memangsa rakyatnya sendiri. Yang intinya jauh dari idealnya, bahwa politik merupakan jalan untuk memperjuangkan kebaikan bersama, keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan.

Banyak anak muda yang cenderung memandang politik sebagai cara untuk merebut kekuasaan semata (Arcilla, 2013). Dengan beranggapan bahwa politik identik dengan kekuasaan. Persepsi pandangan negatif terhadap politik yang terjadi di negeri ini memang sulit dihindari. Dengan banyaknya kasus seperti, penyelewengan kekuasaan, kasus-kasus korupsi perilaku tak etis politisi yang ada, dan hal-hal negatif lainnya dari dunia politik yang dapat dilihat secara transparan di segala media, termasuk media sosial yang menjadi bagian dari kehidupan kaum muda masa kini. Belum reda

dengan satu kasus korupsi yang terjadi, kasus korupsi lainnya terkuak. Dan sebagian besar pelaku korupsi tersebut mempunyai latar belakang partai politik. Begitu seterunya yang menjadikan persepsi anak muda terhadap politik bersifat negatif.

Wajar saja jika anak muda geram terhadap perilaku sebagian pelaku politik yang tidak etis dan korup. Belum lagi penegakan kasus hukum korupsi tidak berjalan dengan baik. Terlalu banyak drama dari para pelaku politik yang ditunjukkan didepan publik yang banyak membuat anak muda menjadi enggan berpolitik. Maka semestinya hal ini menjadi peringatan bagi para pelaku politik. Bagaimanapun, posisi kaum muda yang sering disebut dengan generasi milenial ini cukup menentukan karena jumlah anak muda di negeri ini yang tidak sedikit. Oleh karena itu suara mereka harus didengar dan harus menjadi perhitungan bagi para pelaku politik. Persoalan-persoalan lain yang menyangkut politik yang membuat anak muda khawatir adalah maraknya tulisan yang bersifat provokatif dan kampanye hitam dimedia sosial. Tentunya dapat membuat kebencian sekaligus ketakutan dengan informasi hoaks yang beredar (Zulfa et al., 2019).

Selain itu, rendahnya partisipasi politik masyarakat menjadi indikator kurang baik bagi perkembangan demokrasi suatu negara. Partisipasi dalam berpolitik memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum

baik pemilu legislatif, pemilu presiden, DPD ataupun pemilu kepala daerah. Partisipasi dapat dihubungkan dengan suatu kesadaran politik, sehingga sadar dirinya terhadap politik tiap individu dapat menuntut diberikannya hak untuk bersuara dalam pemilihan suatu pemerintahan. Jenis pemilih yang perlu diperhatikan tingkat partisipasi politik pemilihnya adalah para pemilih pemula karena akan menggunakan hak pilih lagi pada Pemilu tahun 2024. Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilu yang akan datang. Sosialisasi politik kepada pemilih pemula adalah bagian dari suatu proses yang melalui proses tersebut seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan demokrasi yang umumnya berlaku dalam masyarakat tempat orang tersebut berada (Naibaho et al., 2023).

Kesadaran politik terhadap warga negara menjadi salah satu faktor determinan dalam partisipasi politik di kalangan masyarakat, artinya sebagai sesuatu hal yang langsung berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban individu yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik pun menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam suatu proses partisipasi politik. Dengan semakin rendahnya partisipasi pemilih anak muda dalam pemilihan umum di suatu negara menandakan adanya permasalahan yang

memerlukan solusi untuk penyelesaian. Generasi muda merupakan generasi yang sudah mengenal kemajuan teknologi dan sebagai generasi penerus bangsa, sangat amat diperlukan di bidang politik, apabila partisipasi mereka sangat rendah, maka tidak akan ada penerus perpolitikan dalam suatu negara (Zulkarnaen et al., 2020).

Dalam penggunaan media sosial terdapat penyalahgunaan yang menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi partisipasi politik anak muda dalam era digital. Hal ini mencakup penyebaran informasi palsu atau hoaks, kampanye siber yang berpengaruh negatif, dan gelombang politik yang diperkuat oleh *filter bubble* media sosial atau konten yang hanya sesuai dengan preferensi dan pandangan yang sudah ada. Semua hal tersebut dapat mengganggu upaya anak muda untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam politik online. Anonimitas dalam lingkungan online dapat memberikan celah bagi perilaku berbahaya seperti persekusi dan pelecehan. Anak muda yang aktif dalam aktivisme online sering menjadi sasaran ancaman, intimidasi, dan pelecehan secara anonim. Ini dapat menghambat partisipasi mereka dan menciptakan lingkungan yang tidak aman.

Meskipun banyak potensi partisipasi politik anak muda dalam aktivisme online, masih banyak anak muda yang belum terlibat secara optimal. Tantangan termasuk kurangnya literasi digital, ketidakpedulian

terhadap politik, atau perasaan ketidakberdayaan terhadap sistem politik yang ada. Tantangan dan kendala dalam partisipasi politik anak muda dalam organisasi aktivis online adalah faktor-faktor yang dapat membatasi dampak positif dari aktivisme digital. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendidikan, kesadaran, dan tindakan kolektif untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan inklusif (Suwandy et al., 2020).

Kalangan anak muda memberikan keuntungan bagi partai politik apabila masukan pendidikan politik pada kalangan ini diberikan secara intensif sebab kesadaran berpolitik yang tinggi dan demokrasi dalam proses politik pasti akan terwujud. Pendidikan politik penting bagi anak muda karena mereka adalah generasi pemilih di masa yang akan datang. Sebenarnya media sosial dapat dimanfaatkan untuk berpartisipasi bagi kaum muda, namun sampai saat ini untuk partai politik itu sendiri, sosial media hanya digunakan sebagai tempat berpartisipasi, sedangkan terlalu rumit jika dijadikan pondasi untuk melaksanakan kegiatan yang benar-benar terjadi. Memilih bukanlah hal yang mudah, namun tidak memilih bukanlah sikap yang bijak. Anak muda juga memiliki peran politiknya. Tentunya partisipasi dan kesadaran akan pentingnya politik bagi kalangan anak muda harus dilandasi oleh hasrat untuk mencapai tujuan bersama (*public goods*). Oleh karena itu, mulai dari sekarang, anak muda Indonesia harus aktif berpolitik, boleh

dengan ikut serta dalam pemilihan umum atau menyampaikan aspirasinya tentu tidak dengan kekerasan, agar demokrasi berkualitas dapat terwujud dan bisa melahirkan sistem pemerintahan yang lebih baik (Zulfa et al., 2019).

Upaya Peningkatan Kesadaran Berpolitik di Indonesia

Peningkatan kesadaran berpolitik di Indonesia menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk memperkuat dasar demokrasi dan partisipasi masyarakat. Upaya-upaya dalam meningkatkan kesadaran ini melibatkan sejumlah langkah strategis dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil (Pramutomo, 2021). Salah satu langkah penting adalah integrasi pendidikan politik dalam kurikulum pendidikan formal, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ini memberikan landasan pemahaman mengenai sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta proses pengambilan keputusan.

Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran berpolitik, antara lain:

1. Sosialisasi Politik

Banyak orang menganggap sosialisasi sebagai proses belajar karena sifat manusia selalu ingin belajar sesuatu yang baru. Ini termasuk belajar tentang peran, norma, dan prinsip untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Hal ini sejalan dengan gagasan Berger (Sutaryo, 2005), yang menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses

di mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat.

Sosialisasi politik sangat penting dalam proses politik karena keterlibatan individu-individu hingga kelompok-kelompok dalam satu sistem dalam proses politik. Secara umum, menurut Almond dan Verba dalam Zuhri (2010), sosialisasi politik adalah penyebarluasan budaya politik dari generasi ke generasi di suatu masyarakat tertentu. Mas'oed (Mas'oed, 2008) memberikan definisi yang hampir serupa, mengatakan bahwa sosialisasi politik mencakup pembentukan sikap politik dan tingkah laku.

Koirudin (2004) menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pertumbuhan sikap dan orientasi seseorang terhadap fenomena politik, yang umumnya terjadi dalam masyarakat mereka. Dalam kehidupan politik, setiap masyarakat memiliki cara untuk berinteraksi dengan warganya. Dari kanak-kanak hingga dewasa, proses sosialisasi biasanya berjalan secara bertahap.

Ada dua jenis sosialisasi berdasarkan seberapa cepat terjadi. Yang pertama adalah sosialisasi primer, yang terjadi ketika seseorang masih kecil dan belajar menjadi anggota keluarga atau masyarakat. Yang kedua adalah sosialisasi sekunder, yang merupakan perkembangan lanjutan setelah sosialisasi primer dan terjadi selama masa kanak-kanak.

Kedua proses tersebut terjadi di institusi total, seperti tempat tinggal dan

tempat bekerja, di mana sejumlah orang berada dalam kondisi yang sama, terpisah dari masyarakat umum dalam jangka waktu tertentu, menjalani proses kehidupan bersama, dan diatur secara formal.

Menurut (Syarbaini, 2004), jenis sosialisasi dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah sosialisasi formal, yang terjadi melalui lembaga-lembaga yang diatur oleh undang-undang negara atau oleh lembaga yang dibentuk sesuai dengan undang-undang. Yang kedua adalah sosialisasi informal, yang terjadi melalui hubungan kekeluargaan, pertemanan, atau tidak resmi.

Pemerintah, seperti Komisi Pemilihan Umum, melakukan sosialisasi yang disebut sebagai sosialisasi formal. Ini karena lembaga tersebut memiliki kewenangan dan landasan hukum, dan materi yang mereka sampaikan merupakan kebijakan pemerintah. Pemerintah sering menggunakan jenis sosialisasi formal ini saat mensosialisasikan program atau kebijakan baru.

2. Pendidikan Politik

Menurut A. Sudiharto Djiwandono (Djiwardono, 2005), latar belakang pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penggunaan istilah "pendidikan politik" adalah sebagai berikut:

- Dengan adanya waktu, pandangan umum tentang politik sebagai sesuatu yang kotor, penuh pertengangan, dan sebagainya, semakin dihapus. Akibatnya,

masyarakat memperoleh pemahaman politik yang wajar dan sehat. Setiap warga negara harus terus terlibat dalam politik, sadar atau tidak sadar. Kejhidupan politik adalah inti dari kehidupan kenegaraan.

- Untuk meningkatkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, khususnya kesadaran politik mereka, perlu dilakukan dengan cara yang sadar dan terencana, khususnya melalui kegiatan pendidikan. Ini akan lebih efisien dan mencegah penyimpangan seperti yang telah terjadi sebelumnya.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, jelas bahwa masyarakat kita memiliki pemahaman politik yang tidak masuk akal dan tidak sehat. Akibatnya, diperlukan upaya sadar untuk meningkatkan pemahaman rakyat tentang kehidupan negara, yang pada dasarnya adalah kehidupan politik. Pendidikan politik adalah cara untuk mencapai tujuan ini.

Kesadaran politik berarti suatu kondisi psikologis yang tanggap terhadap segala hal yang berkaitan dengan negara, termasuk politiknya. Ini berarti bahwa masyarakat harus memiliki perhatian yang lebih besar pada masalah kenegaraan (Purnawati, 2018).

3. Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi secara sederhana berarti keterlibatan atau partisipasi seseorang,

kelompok orang, atau masyarakat dalam suatu kegiatan. Jika kata "partisipasi" dan "politik" digabungkan, akan muncul gagasan baru, "partisipasi politik". Partisipasi politik adalah keterlibatan atau pelibatan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat dalam kegiatan negara atau sistem politik yang berkaitan dengan proses menentukan dan melaksanakan tujuan sistem. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan pendapat para pakar politik tentang partisipasi politik. Salah satunya adalah Miriam Budiarjo (Budiardjo, 2002), yang menjelaskan definisi dan kegiatan yang termasuk dalam partisipasi politik:

"Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Kegitan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan".

Di negara-negara demokratis, gagasan partisipasi politik didasarkan pada gagasan bahwa rakyat memiliki kedaulatan dan dapat memanfaatkannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan dan masa depan. Oleh karena itu, partisipasi politik adalah manifestasi dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah oleh rakyat, yang ditunjukkan melalui pemilihan umum (Santika, 2021). Untuk berpartisipasi dalam pemilu, warga

negara harus menjadi pemilih pada suatu titik. Secara umum, dapat dikatakan, bahwa pemilihan umum adalah cara demokrasi untuk menciptakan sistem kekuatan yang digunakan oleh rakyat sesuai dengan kehendak mereka sendiri.

IV. SIMPULAN

Kesadaran berpolitik di Indonesia merupakan aspek krusial dalam membangun masyarakat yang partisipatif dan bertanggung jawab terhadap proses demokrasi. Pembahasan mengenai kesadaran berpolitik di Indonesia menunjukkan kompleksitas dan dinamika yang terkait dengan faktor-faktor kunci. Peran teknologi, sebagai salah satu elemen utama dalam era digital, memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran berpolitik di kalangan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi politik, memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dan melibatkan masyarakat secara langsung. Namun, seiring dengan keuntungan tersebut, tantangan yang muncul juga patut mendapat perhatian. Adanya disinformasi, polarisasi, dan ancaman terhadap privasi menjadi tantangan nyata dalam upaya meningkatkan kesadaran berpolitik.

Tantangan tersebut mengindikasikan perlunya pendekatan holistik dan terkoordinasi dalam upaya peningkatan kesadaran berpolitik di Indonesia. Edukasi politik yang menyeluruh, baik di tingkat

formal maupun informal, menjadi kunci dalam membentuk masyarakat yang kritis dan paham terhadap isu-isu politik. Sementara itu, peran aktif pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran ide dan informasi politik yang sehat juga tidak dapat diabaikan.

Upaya peningkatan kesadaran berpolitik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan yang inklusif, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kolaborasi antarstakeholder dapat menjadi fondasi yang kuat dalam membangun kesadaran berpolitik yang berkelanjutan di Indonesia.

Kesadaran berpolitik yang tinggi di masyarakat akan memberikan kontribusi positif dalam membentuk arah demokrasi Indonesia ke depan, mengukuhkan partisipasi publik, dan menciptakan ruang diskusi yang sehat untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

REFERENCES

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arcilla, R. V. (2013). For the stranger in my home: Self-knowledge, cultural recognition, and philosophy of education. *Critical Conversations in Philosophy of Education*, 159–172.
- Budiardjo, M. (2002). *Partisipasi dan Partai Politik*. Gramedia.
- Djiwardono A., S. (2005). *Psikologi Politik*. Mandar Maju.
- Faris, A., Harahap, R., & Harahap, A. M. (2023). *Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata negara*. 9(2), 769–776.
- Hamongan, Alfin J., et al. (2022). *Tingkat Partisipasi Pemilih dan Pengambilan Kebijakan di Indonesia*.
- Hanandita, N. T. (2023). *6 Pengaruh Positif Kemajuan IPTEK di Bidang Politik*.
- Irwan, L., J. A. R., & Jaya, I. (2021). Peningkatan Kesadaran Politik Pada Generasi Muda di Kabupaten Maros. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin*, 2(2).
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mas'oed, M. (2008). *Perbandingan Sistem Politik*. Gadjah Mada University Press.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*.
- Naibaho, L., Simanjutak, J. P., & Pasaribu, Y. S. (2023). Peran Mahasiswa PPKN FIS Universitas Negeri Medan Dalam. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*.
- Nurbaiti, L. (2019). Kesadaran Politik Dan Partisipasi Politik (Pengaruh Tingkat Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Kelurahan Tajur Pada Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018). *Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Pramutomo, R. (2021). Dance, Ceremonialism, and Politic In Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 04(01), 59–66.
<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i1-09>
- Purnawati, L. (2018). Pendidikan Politik Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat (Studi di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung). *Publiciana*, 11(1), 55–71.
- Rahman, A., Latifah, E. D., & Fachrurrazi, S. (2022). Peranan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem*

- Informasi, 6(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sisfo.v6i1.7961>
- Rahmawati, I., & Candra H, T. S. (2019). Pengaruh Media Massa Terhadap Kesadaran Berpolitik Siswa di SMK Negeri 1 Cianjur. *30*(2), 107–112.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945)*. Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual. In *CV. Global Aksara Pers* (Issue 1). Global Aksara Pers.
- Santika, I. G. N., Purnawijaya, I. P. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila. *Seminar Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 74–85.
<https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/semnashk/article/view/1665>
- Supriyadi, S. (2017). Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 2(2), 83–93.
- Sutaryo. (2005). *Dasar-dasar sosialisasi*. Rajawali Press.
- Sutjipto, V. W., Putri, M. L., Sary, M. P., Putri, A. D., Wulandari, H., & Fauziyah, H. N. (2023). Pengaruh Kesadaran Berpolitik Terhadap Partisipasi Politik Kaum
- Millenial. *Al-KALAM : JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 10(2), 117.
<https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i2.10898>
- Suwandy, S., Firman, M., & Anugrah, A. W. (2020). Partisipasi Politik Anak Muda dalam Organisasi Aktivis Online: *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Syarbaini, S. dkk. (2004). *Sosiologi dan Politik. Ghalia Indonesia*.
- Syuhada, O. (2023). TERBENTUKNYA BUDAYA POLITIK PAROKIAL DALAM TATANAN KEHIDUPAN BERNEGARA YANG DEMOKRATIS. *PRESUMPTION of LAW*, 5(3).
- Wiratraman, H. P. (2019). Press Freedom, Law and Politics in Indonesia : A Socio-Legal Study. In *Leiden University*. Leiden University.
- Zulfa, A. N., Sari, E. P., & Trisiana, A. (2019). Meningkatkan Kesadaran Berpolitik di Kalangan Anak Muda. *E-Journal Universitas Slamet Riyadi*.
- Zulfa, Anisah Nasih, Sari, E. P. P., & Trisiana, A. (2019). Meningkatkan Kesadaran Politik di Kalangan Anak Muda. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 17–29.
<https://doi.org/10.33061/jgz.v7i1.3054>
- Zulkarnaen, F., Adara, A. S., & Rahmawati, A. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*.